Senin 31 Juli 2017, 20:19 WIB

WALHI: Pembangunan Hotel di Gunung Sewu Gunungkidul Ancam GeoPark

Edzan Raharjo - detikNews

Foto: Bagus Kurniawan/detikcom

Yogyakarta - Pembanguna resort, hotel dan villa di kawasan Pantai Seruni, Tepus, Gunungkidul dinilai merusak bukit Karst. Pembangunan itu disebut sudah melakukan tahapan kontruksi padahal belum mengantongi IMB.

Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS) mendesak pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengambil langkah tegas dengan menghentikan pembangunan dan melakukan penyegelan di lokasi. Pemkab Gunungkidul diminta serius melindungi Kawasan Bentang Alam KARST (KBAK) Gunung Sewu dari upaya-upaya perusakan bukit Karst.

Direkur WALHI Yogyakarta, Halik Sandera mengatakan, Kawasan Bentang Alam KARST (KBAK) Gunung Sewu sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah sehingga

tata air dan menyimpan nilai ilmiah sehingga harus dilindungi keberadaanya. KBAK Gunung Sewu merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional, yang ditetapkan melalui keputusan menteri ESDM nomor 3045 K/40/MEM/201.

"Status GeoPark Gunung Sewu yang ditetapkan UNESCO kemungkinan bisa dicabut jika proses investasi terus masuk dan merusak kawasan bentang alam," kata Halik kepada wartawan dalam jumpa pers di sekretariat WALHI Yogyakarta, Senin(30/7/2017).

Dengan adanya pembangunan besar-besaran tersebut, lanjut Halik, juga akan mengancam ekosistem. Di kawasan Karst Gunung Sewu ini terdapat hewan-hewan endemik. Kerusakan alam yang terjadi dinilai juga akan mengancam keberadaan hewan-hewan endemik.

Selain itu, pembangunan besar-besaran oleh investor akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakatnya. Dan apakah masyarakatnya siap dengan perubahan terutama mata pencaharian

Dengan adanya pembangunan besar-besaran tersebut, lanjut Halik, juga akan mengancam ekosistem. Di kawasan Karst Gunung Sewu ini terdapat hewan-hewan endemik. Kerusakan alam yang terjadi dinilai juga akan mengancam keberadaan hewan-hewan endemik.

Selain itu, pembangunan besar-besaran oleh investor akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakatnya. Dan apakah masyarakatnya siap dengan perubahan terutama mata pencaharian petani beralih ke lainnya.

Halik melanjutkan, di lokasi yang akan dibangun selama ini merupakan kawasan pertanian yang dimanfaatkan masyarakat dengan sistem tadah hujannya.

"Jika lahan dikuasai investor maka berdampak pada mata pencaharian warga," kata Halik. **(sip/sip)**

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Bukit di Pantai Seruni yang menjadi bagian Bentang Alam Karst Gunung Sewu di Kabupaten Gunungkidul terancam rusak.

Di kawasan tersebut bakal dibangun resor berbentuk condotel dan vila yang menghadap ke arah Pantai Seruni.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DI Yogyakarta, Halik Sandera, mengatakan, proses pembangunan resor di Pantai Seruni sudah mulai terlihat sejak Januari 2017. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari hilangnya sebagian badan bukit di pantai tersebut.

"Fakta di lapangan lainnya, tahapan konstruksi juga sudah dilakukan," ujar Halik kepada wartawan di kantor Walhi DIY, Jalan Nyai Pembayun, Kota Yogyakarta

Jalan Nyai Pembayun, Kota Yogyakarta, Senin (31/7/2017).

Baca juga: Kampanyekan Hari Antitambang, Walhi Pamerkan Foto Karst dan Batu Bara

Halik mengatakan, pembangunan hunian tak jauh dari bibir pantai itu juga tidak menghiraukan Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Nomor 3045 K/40/MEM/2014.

Sebab, kata dia, bukit karst yang berada di Kecamatan Tepus yang termasuk KBAK itu merupakan kawasan lindung geologi.

"KBAK Gunung Sewu memiliki komponen geologi yang unik, berfungsi sebagai pengatur tata air dan menyimpan nilai ilmiah," kata Halik.

Dikatakan Halik, luas lahan yang bakal dibangun untuk resor mencapai tiga hektar. Berdasarkan informasi yang dihimpun Walhi di lapangan, nilai investasi pembangunan kawasan tersebut mencapai Rp 8 miliar.

"Apa yang terjadi di Pantai Seruni ini bisa menjadi triger (pemicu) investasi berisiko tinggi. Kalau ini dilanjutkan pembangunan berskala besar, khususnya di KBAK Gunung Sewu, akan terjadi," ucap Halik.

Apapun alasannya, Halik menilai, pembangunan di KBAK Gunung Sewu sangat berdampak bagi kelestariannya. Menurutnya, menghilangkan sebagian badan bukit, misalnya, telah merusak ciri dari kawasan bentang alam.

"Di lapangan, setelah proses perataan

"Di lapangan, setelah proses perataan tanah, ditemukan sungai bawah tanah. Artinya ketika sungai bawah tanah itu terbuka berpotensi terjadi kerusakan yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya suplai air bawah tanah," ucap Halik.

Merusak ekosistem

Tak hanya merusak kelestarian, ucap Halik, pembangunan di Pantai Seruni juga berdampak bagi ekosistem di lingkungan sekitarnya. Menurutnya, hewan endemik yang ada di sungai bawah tanah terancam punah dengan adanya pembangunan tersebut.

"Dalam ekosistem sederhana, hewan lain yang terdampak lainnya, seperti kelelawar. Hewan ini membantu proses penyeburan

Hewan ini membantu proses penyeburan yang daya jelajahnya 10 kilometer. Kalau terjadi kerusakan akan mengubah ekosistem dari kelelawar itu," tutur Halik.

Halik menyebut Walhi dengan tegas menolak pembangunan resor di Pantai Seruni apapun alasannya.

Halik mengatakan, pembangunan resor juga belum mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) meski sudah melakukan tahapan konstruksi. Untuk itu, kata dia, pemerintah Kabupaten Gunungkidul wajib menghentikan proses pembangunan.

"Pemerintah wajib menjaga dan melindungi KBAK Gunung Sewu sebagai kawasan lindung geologi dari perusakan dan pemanfaatan dengan cara mengubah bentang alamnya," kata Halik.

lindung geologi dari perusakan dan pemanfaatan dengan cara mengubah bentang alamnya," kata Halik.

Baca juga: KLHS Belum Bisa Putuskan Soal Status Karst Watuputih Rembang

Halik pun meminta dengan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menjalankan amanat RPJMD. Menurutnya, mengembangkan dan mengoptimalkan orientasi pembangunan perekonomian daerah harus berwawasan lingkungan.

"Dalam Perda Nomor 6 tahun 2011 juga disebutkan tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul, dijelaskan pengelolaan kawasan lindung geologi," kata Halik.

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diminta untuk menghentikan pembangunan resor berupa hotel dan vila di kawasan Pantai Seruni, Gunungkidul. Desakan penghentian proyek yang dilakukan oleh PT Gunung Samudra Tirtomas ini disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS).

READ MORE

- Lulus SD, Gadis Ini Dapat Hadiah Keliling Indonesia Dari Orangtua
- Kesehatan Membaik, Justru Saat Orangtua Siapkan Pemakamanku
- Tiket Pesawat Promo Agustus 2017

Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIY yang tergabung dalam KMPPS, Halik Sandera, lokasi yang digunakan untuk membangun resort di Pantai Seruni berada dalam Kawasan Bentang Alam Ka

lar

Karst (KBAK) Gunung Sewu. KBAK Gunung Sewu, lanjut Halik, memiliki komponen geologi yang unik, berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan perlu dilindungi serta dilestarikan.

"KBAK Gunung Sewu termasuk dalam kawasan lindung geologi, sesuai keputusan menteri ESDM No 3045 K/40/MEM/2014. Hal itu menjadi mandat rencana tata ruang wilayah nasional," ujar Halik, Senin (31/7)

Halik menyampaikan bahwa pengembang juga telah melakukan tahap konstruksi padahal belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, kata Halik, pembangunan juga disinyalir menggunakan lahan seluas tiga hektar dengan pemaprasan bukit.

"Pemaprasan bukit bisa merusak ciri kawasan bentang alam. Selain juga dalam jangka panjang bisa membuat suplai air bawah tanah akan berkurang," terang Halik.

Halik mengungkapkan bahwa Pemkab Gunungkidul dinilai melakukan pembiaran perusakan KBAK yang diatur dalam Perda Gunungkidul No 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, serta Perda No 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Gunungkidul No 11 Tahun 2012.

"Pesisir selatan berdekatan dengan potensi gempa dan tsunami. Karena berdekatan dengan episentrum," jelas Halik.

Halik menegaskan bahwa KMPPS meminta Pemkab Gunungkidul untuk menghentikan proses pembangunan dengan penyegelan lokasi. KMPPS, sambung Halik, juga meminta Pemkab Gunungkidul melindungi KBAK Gunung Sewu sebagai kawasan lindung geologi dari perusakan dan pemanfaatan dengan mengubah bentang alamnya.

(mdk/bal)

Gunung Kidul

Kawasan Karst Gunung Sewu Dirusak Pembangunan Hotel

Oleh: Wilujeng Kharisma 31 July, 2017 - 20:18

NASIONAL

Karst Gunung Sewu/WILUJENG KHARISMA/PR

Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan

YOGYAKARTA, (PR).- Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS) menolak tegas pembangunan resort, hotel, dan villa di kawasan Pantai Seruni, Tepus, Gunungkidul. Pasalnya, pembangunan tidak mengantongi izin dan dilakukan di kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunung Sewu.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Halik Sandera mengatakan, telah terjadi pelanggaran dengan adanya pembangunan gedung bertingkat yang dapat merusak alam. "Setelah diteliti ternyata pengembang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) padahal pembangunan sudah berjalan dan badan bukit sudah dikeruk dan diratakan, tentu ini adalah perusakan," ujar Halik pada Senin, 31 Juli 2017.

Halik mengatakan, KBAK Gunung Sewu

Halik mengatakan, KBAK Gunung Sewu memiliki komponen geologi yang uni dan berfungsi sebagai pengatur alama tata air sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi keberadaannya. Adanya pembangunan serta pengerukan bukit karst dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan mengancam kelestarian hewan endemik yang ada di sungai bawah tanah.

"Apa yang terjadi di Pantai Seruni ini bisa menjadi pemicu investasi berisiko tinggi lainnya sehingga kalau ini terus dilanjutkan maka pembangunan berskala besar di KBAK Gunung Sewu akan terus terjadi," ujarnya.

Mewakili instansi dan KMPPS, Halik mendesak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menghentikan perusakan KBAK Gunung Sewu, dengan menutup dan menghentikan segala proses pembangunan di kawasan Pantai Seruni

tersebut. Pemerintah harus tetap menjalankan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yakni pemanfaatan potensi kawasan karst dengan berwawasan lingkungan.

Peraturan bersama

Sebelumnya, Bupati Gunungkidul, Bupati Pacitan, dan Bupati Wonogiri sepakat menandatangani peraturan bupati bersama terkait pengelolaan Geopark Gunung Sewu. Hal ini dilakukan untuk memantapkan pengelolaan Geopark Gunung Sewu yang mencakup tiga daerah, yakni Kabupaten Gunungkidul, Pacitan dan Wonogiri.

Bupati Gunungkidul, Badingah, mengatakan, Geopark Gunung Sewu yang mencakup wilayah tiga Kabupaten dan tiga provinsi, yakni Gunungkidul, Pacitan dan Wonogiri, memiliki potensi sumber

dan Wonogiri, memiliki potensi sumber daya yang luar biasa untuk dimanfaatkan secara lestari.

Menurut Badingah, penandatanganan peraturan bupati bersama ini dimaksudkan agar pengelolaan Geopark Gunungsewu bisa efektif dan dapat menyesuaikan dengan situasi ke depan, menjalang validasi pada tahun 2019 mendatang.

"Peraturan bupati bersama ini perlu dilakukan untuk mensinergikan keanekaragaman geologi, hayati, dan juga budaya Geopark Gunungsewu yang membentang di tiga kabupaten, untuk dimanfaatkan secara lestari," ujarnya.***

Tags: *karst* *gunung sewu* *Yogyakarta* *hotel*

Pembangunan Resort Seruni Dinilai Tabrak Kawasan Lindung Karst

Senin, 15 Mei 2017 02:22:00 WIB | oleh : aji-awalani | 0 komentar

Tepus,(gunungkidul.sorot.co)--Selain belum mengantongi izin resmi dari pemerintah, pembangunan resort berkelas di kawasan Pantai Seruni, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, ternyata juga menabrak Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunung Sewu yang jelas-jelas ditetapkan sebagai kawasan lindung karst.

Indikasi pelanggaran tersebut karena bangunan yang sudah hampir jadi itu ternyata ditemukan luweng atau aliran sungai bawah tanah setelah dilakukan pengerukan de[illegible]an menggunakan alat berat berupa bagh[illegible]

> *"Dalamnya kurang lebih 15 meter dan ada suara gemericik air yang mengalir," kata Wasdi, warga sekitar resort.*

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Halik Sandera membenarkan adanya pelanggaran yang dilakukan pihak pengembang dalam membangun resort di kawasan lindung karst Gunung Sewu itu.

> *"Seharusnya pemerintah menghentikan proses pembangunan. Karena selain melanggar UU atas bangunan, juga melanggar UU tata ruang terkait kawasan lindung geologi," tegasnya, Minggu, (14/05/2017).*

Ditetapkannya Gunungkidul sebagai kawasan lindung karts Gunung Sewu oleh UNESCO sudah semestinya menjadi kepatuhan bagi semua pihak agar tidak serampangan dalam melakukan pembanguanan, apalagi dalam skala besar. Hal itu jika dilakukan akan berdampak pada perubahan bentang alam karst.

Menurut Halik, Gunungkidul adalah kawasan lindung karst Gunung Sewu terluas dibanding Wonogiri dan Pacitan, Jawa Tengah.

> *"Pelanggaran oleh pengembang itu dampaknya nanti akan mengganggu sistem hidrologi air sungai bawah tanah dan tidak dapat menyerap air hujan,"imbuhnya.*

Adapun sistem pembangunan pariwisata yang dapat dilakukan, tutur Halik, adalah de menerapkan ekowisata yang berbasis masyarakat

Pendirian Resort Seruni Ternyata Belum Berizin

Sabtu, 06 Mei 2017 10:58:00 WIB | oleh : toto-sudiarjo | 0 komentar

Wonosari, (gunungkidul.sorot.co)-- Perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Gunungkidul semakin menjadi incaran banyak investor untuk membangun fasilitas destinasi wisata. Akan tetapi masuknya investor ke Gunungkidul kerap kali melampaui batas-batas prosedural yang sudah ditentukan pemerintah.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya terkait pembangunan resort berkelas di pesisir Pantai Seruni, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, investor bernama RB sudah nekat membangun meskipun proses perizinan baru dalam tahap pengajuan ke berbagai pihak terkait.

"Ya begitulah yang terjadi

"Ya begitulah yang terjadi. Jadi cara pandang investor itu kan berbeda dengan pemerintah. Mereka lebih melihat momen meskipun secara prosedural baru dalam tahap proses," kata Azis Saleh, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Gunungkidul, Sabtu (06/05/2017).

Meskipun pihak pengembang sudah mengajukan izin, namun hingga saat ini prosesnya baru pada tahap pengkajian di Dinas Lingkupan Hidup. Padahal untuk mengeluarkan hasil kajian lingkungan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Paling cepat izin lingkungan itu keluar sekitar tujuh bu[illegible]" imbuhnya.

Aktivis Lingkungan Memprotes Pembangunan Resor di Gunung Kidul

SELASA, 01 AGUSTUS 2017 | 20:15 WIB

Suaka Margasatwa Paliyan, Gunung Kidul, Yogyakarta

TEMPO.CO, **Yogyakarta**-Para pegiat kelestarian lingkungan memprotes pembangunan resort di kawasan wisata K

l. Sebab,

wisata Kabupaten Gunung Kidul. Sebab, lokasi tempat resort dibangun merupakan kawasan karst yang dilindungi. Namun demi kepentingan investasi dan patiwisata, bukit karst itu dipotong.

"Jika pembangunan diteruskan, maka akan merusak bentang karst. Apalagi tidak ada izin mendirikan bangunan," kata Halik Sandera, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Senin, 31 Juli 2017.

Para aktivis lingkungan yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS) mendesak Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menghentikan proyek resort di Pantai Seruni, Tepus. Kawasan yang dibangun resort oleh investor berada di Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu.

Baca: Gu... an

"Jika tak dihentikan, proyek ini kami khawatirkan bisa jadi trigger kedatangan investor selanjutnya yang berpotensi mengancam kelestarian bentang alam dan ekosistemnya," ujar dia.

Menurut Halik kawasan itu sudah jelas-jelas dilindungi. Sehingga pembaungunan resort di lahan 30.000 meter persegi dinilai melanggar Keputusa... ...or 3045

Keputusan Menteri ESDM Nomor 3045 K/40/NEM/2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gunungkidul 2016-2021, Peraturan daerah Gunung Kidul 6/2011 tentang RTRW, dan Peraturan Daerah Gunung Kidul 11/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Simak: Festival Kesenian Yogyakarta di Gunung Kidul Harus Ada Inovasi

Halik menambahkan selain aspek regulasi, kondisi alam di lokasi pembangunan telah mengalami kerusakan. Padahal, eksploitasi bukit karst yang termasuk kawasan lindung geologi itu hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata warisan dunia. Se... tersebut merupak... Bukan

pendidikan, dan pariwisata warisan dunia. Sebab, tutur dia, lokasi tersebut merupakan kawasan *geopark*. Bukan investasi skala besar tanpa mentaati aturan.

Aktivis peduli lingkungan dari Gunung Kidul Himawan Kurniadi mengatakan proyek resort secara langsung akan menutup akses warga dan terjadi privatisasi ruang publik di kawasan karst. Seharusnya, kata dia , pemerintah menghentikan pembangunan dengan melarang investor masuk.

Lihat: Misteri Pulung Gantung, Gunungkidul Bentuk Tim Cegah Bunuh Diri

"Pemerintah tidak boleh diam dengan membiarkan perusakan kawasan karst. Kalau terjadi kerusakan bentang karst, berarti p

Lihat: Misteri Pulung Gantung, Gunungkidul Bentuk Tim Cegah Bunuh Diri

"Pemerintah tidak boleh diam dengan membiarkan perusakan kawasan karst. Kalau terjadi kerusakan bentang karst, berarti pemerintah tidak bisa melindungi alam yang sudah jadi kawasan Bentang Alam kars," kata dia.

Kawasan resort Kabupaten Gunung Kidul dibangun oleh PT Gunung Samudera Tirtomas. Para Aktivis menduga ada pelanggaran oleh pemerintah daerah dengan membiarkan investor merusak kawasan karst tersebut.

MUH SYAIFULLAH